

**PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, PROFITABILITAS, DAN LEVERAGE, TERHADAP TAX AVOIDANCE
(Studi Empiris Pada Perusahaan Jasa dan Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014)**

**Oleh :
Nofiana Febriati
Pembimbing : Kirmizi dan Azhari S.**

*Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia
Email : nofiana.febriati16@yahoo.com*

*The Effect of Corporate Governance, Profitability, and Leverage
on Tax Avoidance
(Empirical Study on Service and Transportation Companies Listed
in Indonesia Stock Exchange 2012-2014)*

ABSTRACT

This research aimed to examine the impact of independence board, audit committee, institutional ownership, corporate size, profitability, and leverage against Tax Avoidance. The population of this research are service and transportation companies that listed on Indonesian Stock Exchange during 2012-2014. The sample used in this research determined by purposive random sampling method, and totally amounted 25 companies that match to the criteria that have been set. The analysis method that used in this research is double linear regression analysis test assisted with SPSS Windows Ver 20. Result of this research indicated that profitability and leverage significantly affect tax avoidance, and independence board, audit committee, institutional ownership, and corporate size which proxies corporate governance have no effect on tax avoidance. Result of coefficient of determination (adjusted R^2) is 0,625, it means that the overall effect of independent variables against tax avoidance is 62,5% while the remaining amounted 37,5% is influenced by the other independent variables that not used in this research.

Keywords : Audit Committee, Corporate Governance, Corporate Size, Independence Board, Institutional Ownership, Leverage, Profitability, Tax Avoidance.

PENDAHULUAN

Pembiayaan pembangunan nasional diperoleh dari penerimaan negara yang lebih dari 70 % berasal dari penerimaan pajak. Namun pada kenyataannya, terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dan

pemerintah. Pemerintah menggunakan pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembangunan nasional, namun di sisi lain perusahaan sebagai Wajib Pajak selalu berusaha untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan, karena anggapan bahwa pajak yang

dibayarkan oleh perusahaan tidak memberikan manfaat ekonomis bagi keuntungan perusahaan dan mengurangi laba bersih. Oleh sebab itu, manajemen penghindaran pajak, yang dilakukan dengan memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperbolehkan dalam ketentuan perpajakan, maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur (*loopholes*) dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menekan serendah mungkin beban pajak yang harus dibayarkan sepanjang tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, atau dengan kata lain legal. Praktik penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan mekanisme rumit yang dapat dilakukan oleh perusahaan dengan skala besar.

Untuk mendeteksi adanya praktik penghindaran pajak yang terjadi di dalam perusahaan dapat menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). Perusahaan dengan ETR yang lebih rendah dari 25% dianggap melakukan praktik penghindaran pajak. Beberapa perusahaan yang tarif pajak efektifnya kurang dari 25%, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Daftar ETR dan CETR perusahaan jasa dan transportasi tahun 2012

No	Nama Perusahaan	ETR (%)	CETR (%)
1.	Pelayaran Tempuran Emas Tbk.	14,7	10,4
2.	Nusantara Infrastructure Tbk.	10,7	7,6
3.	PT. Tempo Inti Media Tbk.	15,4	17,2
4.	PT. Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk	6,9	3,2
5.	PT. Tanah Laut Tbk	6,3	6,0
6.	Citra Marga	21,7	16,5

	Nusaphala Persada Tbk.		
7.	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	24,2	23,1
8.	Adi Sarana Armada Tbk	13,5	23,6

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan

Good Corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik merupakan struktur dan proses yang mengatur dan mengendalikan perusahaan serta hubungan hak dan tanggung jawab diantara *stakeholders*. *Corporate Governance* diproksikan dengan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan dapat meminimalisasi praktik penghindaran pajak karena dikaitkan dengan tugasnya untuk mengawasi manajemen. Sehingga manajer cenderung mengurangi praktik penghindaran pajak yang berlebihan. Sari (2014) menemukan bahwa presentase dewan komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap praktik penghindaran pajak.

Komite audit akan membuat perusahaan lebih terbuka dan bertanggungjawab dalam menyajikan laporan keuangannya. Tentu saja hal tersebut akan mengurangi praktik penghindaran pajak secara agresif yang dilakukan oleh perusahaan. Annisa dan Kurniasih (2012) yang menemukan bahwa komite audit berpengaruh signifikan secara negatif terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan terhadap manajemen, karena sifatnya independen, dan berasal dari luar perusahaan. Tingginya kepemilikan

institusional akan mengurangi praktik penghindaran pajak. Ngadiman dan Puspitasari (2014) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang besar memiliki peluang yang besar pula untuk melakukan penghindaran pajak, dengan memanfaatkan celah-celah dari transaksi yang kompleks serta sumber daya yang mampu untuk memanfaatkan celah tersebut dan melakukan praktik penghindaran pajak. Sejalan dengan itu, Oktagiani (2015), Swingly (2015), dan Surbakti (2012) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan secara positif terhadap praktik penghindaran pajak.

Profitabilitas merupakan indikator kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan dengan laba yang diperoleh. Tingginya laba tentu saja akan membuat pajak yang harus dibayarkan semakin tinggi pula, hal tersebut yang mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Surbakti (2012) yang menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara tingkat profitabilitas dengan penghindaran pajak.

Leverage menggambarkan sejauh mana perusahaan dibiayai dengan pinjaman dari pihak luar perusahaan. Besarnya pinjaman sejalan dengan beban bunga, beban atas bunga pinjaman dapat dijadikan sebagai pengurang pajak (*deductible expense*) sebagaimana yang dipaparkan dalam Undang Undang no. 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 tentang PPh. Semakin besar rasio utang maka semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Swingly

(2015); Oktagiani (2015); dan Kurniasih dan Sari (2013) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh antara *leverage* dengan tindakan penghindaran pajak.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah pengaruh komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris bahwa: 1) Komisaris independen mempengaruhi tingkat penghindaran pajak pada perusahaan. 2) Komite audit mempengaruhi tingkat penghindaran pajak pada perusahaan. 3) Kepemilikan institusional mempengaruhi tingkat penghindaran pajak pada perusahaan. 4) Ukuran perusahaan mempengaruhi tingkat penghindaran pajak pada perusahaan. 5) Profitabilitas mempengaruhi tingkat penghindaran pajak pada perusahaan. 6) *Leverage* mempengaruhi tingkat penghindaran pajak pada perusahaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan perencanaan yang legal atas tindakan pembayar pajak untuk mengurangi kewajiban perpajakannya. Ini digunakan untuk mendeskripsikan pencapaian penghindaran dengan perencanaan tiruan dari hubungan pribadi dan bisnis untuk mengambil keuntungan dari celah (*loopholes*), ambiguitas, anomali, atau defisiensi lainnya dari hukum pajak (Suandy, 2008).

Komite urusan fiskal dari OECD menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak yaitu:

- a. Adanya unsur artifisial,
- b. Memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang,
- c. Kerahasiaan sebagai bentuk dari skema ini di mana para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak.

Suandy (2008) memaparkan bahwa ada beberapa motivasi yang mendasari wajib Pajak melakukan tindakang minimalisasi pajak secara ilegal atau penggelapan pajak (*tax evasion*), diantaranya yaitu:

- a. Jumlah pajak yang harus dibayar;
- b. Biaya untuk menyuap fiskus;
- c. Kemungkinan untuk terdeteksi;
- d. Besar sanksi.

Corporate Governance

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga memicu biaya keagenan (Jensen dan Meckling, 1976). *Good Corporate Governance* akan mengatasi konflik keagenan dengan tidak merugikan agen maupun prinsipal.

Cadbury Committee mendefinisikan *corporate governance* sebagai: Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawannya serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

OECD memaparkan prinsip-prinsip yang mendasari *corporate governance*. yaitu:

- a. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran);
- b. *Transparency* (Transparansi);
- c. *Accountability* (Akuntabilitas);
- d. *Responsibility* (Tanggung jawab);
- e. *Independency* (kemandirian).

Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan seorang atau sekelompok orang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan di BEI (Pohan, 2008). Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEJ/07-2004 bahwa proporsi komisaris independen terhadap seluruh dewan komisaris adalah sebesar 30%.

Komisaris independen memegang peranan penting dalam perusahaan terutama dalam pelaksanaan GCG. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT), tugas dewan komisaris adalah: (1) mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan, dan (2) memberikan nasihat kepada direksi.

Komite Audit

Komite audit adalah komite dalam perusahaan yang anggotanya dipilih oleh dewan komisaris perusahaan yang bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan pengendalian sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dengan menciptakan

keadilan, akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, dan tepat waktu. Komite audit juga bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.

Bapepam dengan Surat Edaran No. SE-03/PM/2000 mensyaratkan bahwa setiap perusahaan publik di Indonesia wajib membentuk komite audit dengan anggota minimal 3 orang yang diketuai oleh satu orang komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan.

Adapun komite audit memiliki beberapa fungsi diantaranya:

- Melakukan interaksi dengan auditor eksternal;
- Melakukan pengawasan terhadap pengendalian internal;
- Melakukan pengawasan terhadap bagian audit internal;
- Memberikan wewenang untuk merekrut penasihat atau konsultan;
- Menangani keluhan terkait akuntansi, pengendalian internal berkaitan dengan akuntansi, serta audit (Lindberg, 2004).

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan saham institusional adalah kepemilikan saham yang sebagian besar dipunyai oleh institusi baik itu bank dan perusahaan investasi maupun lembaga lainnya. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin besar pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal.

Pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Mereka berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan hak

suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri (Shleifer dan Vishney, 1986). Pemilik institusional melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan, karena adanya tanggung jawab perusahaan untuk membayar dividen kepada pemegang saham.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah skala atau nilai dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya berdasarkan total aktiva, log size, nilai saham, dan lain sebagainya. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan total aset yang kecil (Surbakti, 2012).

Perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar dari perusahaan kecil. Sebagai upaya untuk mengurangi biaya keagenan tersebut, perusahaan besar mungkin akan berusaha untuk mengungkapkan informasi yang lebih banyak (Jensen dan Meckling, 1976). Pengungkapan informasi yang lebih banyak merupakan salah satu upaya perusahaan untuk mewujudkan akuntabilitas publik.

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang

ditunjukkan dengan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Profitabilitas perusahaan akan menunjukkan seberapa efisien manajemen mampu menghasilkan laba dengan menggunakan segala sumber daya yang tersedia.

Ada tiga rasio yang dapat digunakan dalam rasio profitabilitas, yaitu rasio profit margin, *Return on Asset* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE). Pengukuran kinerja dengan ROA menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. ROA adalah rasio keuntungan bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan (Maharani dan Suardana, 2014).

Leverage

Leverage adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Rasio ini dapat melihat sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Perusahaan yang baik semestinya mempunyai modal lebih besar daripada hutang.

Perusahaan menggunakan *leverage* agar keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya assets dan sumber dananya, sehingga dapat meningkatkan keuntungan pemegang saham. *Leverage* juga meningkatkan variabilitas (risiko) keuangan, karena jika perusahaan ternyata mendapatkan keuntungan yang lebih rendah dari biaya tetapnya maka penggunaan *leverage* akan

menurunkan keuntungan pemegang saham (Marfu'ah, 2015).

Kerangka Pemikiran Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Komisaris independen bertugas untuk menjamin strategi perusahaan, mengawasi kinerja manajer, serta mengawasi terlaksananya akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Komisaris independen melaksanakan fungsi monitoring sehingga dapat membantu kinerja dewan direksi. Termasuk dalam hal perpajakan, kinerja manajemen yang cenderung diawasi oleh komisaris independen akan bertindak lebih hati-hati terutama dalam aktivitas penghindaran pajak yang berlebihan sehingga tidak mengarah pada penggelapan pajak.

Manajemen seringkali bersikap oportunistik dimana mereka akan mengutamakan peningkatan laba untuk memperoleh bonus. Karena itu komisaris independen diharapkan dapat memberikan pengawasan yang ketat terhadap kinerja manajemen sehingga praktik penghindaran pajak dapat diminimalisir.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Komisaris Independen berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Komite audit bertanggungjawab untuk mengawasi dan menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, mengamati sistem pengendalian internal perusahaan, mengawasi audit

eksternal, serta melaporkan kepada komisaris mengenai risiko yang sedang atau akan dihadapi perusahaan. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen secara berlebihan dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan. Komite audit akan mendeteksi risiko yang ditimbulkan dari praktik penghindaran pajak agresif yang mengarah pada penggelapan pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H2: Komite audit berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional membantu mengawasi kinerja manajer serta mempengaruhi manajer untuk meminimalisasi tindakan penghindaran pajak, kepemilikan institusional menekankan pengawasan terhadap manajer. Konsentrasi kepemilikan institusional yang tinggi akan membuat tindakan penghindaran pajak menjadi rendah, karena tingginya tingkat pengawasan terhadap kinerja manajemen.

Berdasarkan uraian di atas maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Besarnya perusahaan akan mempengaruhi jumlah dan besar transaksi yang terjadi dalam perusahaan, semakin besar perusahaan tentu laba yang dihasilkan

juga akan bernilai besar, hal itu tentu saja akan menarik perhatian pemerintah. Selain itu semakin besar perusahaan maka semakin kompleks pula transaksinya, sehingga terdapat celah-celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak.

Berdasar pemaparan di atas dapat diajukan hipotesis:

H4: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengelola aset sehingga memperoleh keuntungan operasionalnya yang ditunjukkan dengan laba perusahaan. Demikian tingginya profitabilitas perusahaan akan dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal dan cenderung aktivitas *tax avoidance* akan mengalami penurunan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi pula nilai laba perusahaan, tingginya nilai laba menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas juga tinggi.

Berdasar pemaparan di atas dapat diajukan hipotesis:

H5: Profitabilitas berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

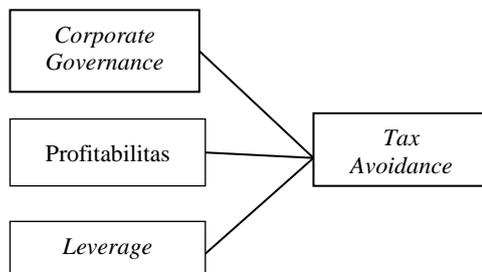
Leverage merupakan rasio pembiayaan yang dilakukan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasionalnya. Kebijakan pendanaan dan keputusan investasi dapat mempengaruhi ada atau tidaknya penghindaran pajak yang dilakukan

oleh perusahaan. Dengan melakukan pinjaman dari pihak luar, perusahaan dapat memanfaatkan bunga pinjaman sebagai pengurang pajak (*deductible expense*), artinya semakin tinggi *leverage* maka semakin besar pula praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H6: *Leverage* berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Gambar 1
Model Penelitian



Sumber: Data Olahan, 2017.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti, sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan jasa dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2012-2014. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, yang artinya dalam penentuan sampel menggunakan pertimbangan tertentu, yaitu perusahaan yang terdaftar di BEI dan menerbitkan laporan keuangan

auditan per 31 Desember selama tahun 2012-2014 dan tidak *delisting* selama tahun pengamatan, memiliki data lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, tidak mengalami kerugian, dan mengungkapkan laporan keuangan dalam mata uang rupiah. Maka berdasar kriteria tersebut ada 25 perusahaan sampel dengan total 75 observasi.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda yang persamaannya dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

Keterangan:

- Y : Penghindaran pajak
- α : Konstanta
- $\beta_1 - \beta_6$: Koefisien regresi
- X_1 : Dewan komisaris independen
- X_2 : Jumlah anggota komite audit
- X_3 : Kepemilikan institusional
- X_4 : Ukuran perusahaan
- X_5 : Profitabilitas
- X_6 : *Leverage*
- e : error

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak diukur dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate (CETR)* yang merupakan rasio yang membagi kas yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. CETR dirumuskan sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Kas untuk membayar pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Proporsi komisaris independen diukur dengan rumus berikut:

$$BOARDINDP = \frac{\sum \text{komisaris independen}}{\sum \text{seluruh komisaris perusahaan}}$$

3. Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk untuk membantu tugas dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap direksi terkait pelaporan keuangan perusahaan. Variabel komite audit diukur dengan menjumlahkan seluruh anggota komite audit, dirumuskan sebagai berikut:

$$ACOM = \sum \text{anggota komite audit}$$

4. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan institusional adalah presentase jumlah saham yang dimiliki oleh institusi dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar, dirumuskan sebagai berikut:

$$INST = \frac{\sum \text{saham dimiliki institusi}}{\sum \text{lembar saham beredar}}$$

5. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan, dan kapitalisasi pasar, Guna dan Herawaty (2010) dalam Utami (2013). Ukuran perusahaan diukur berdasar total aset yang dimiliki oleh perusahaan yang ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural, dirumuskan sebagai berikut:

$$Size = Ln (Total Aset)$$

6. Profitabilitas

Rasio profitabilitas mengukur tingkat kinerja keuangan dari suatu perusahaan. Indikator yang seringkali digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas adalah ROA (*Return on Asset*) dan ROE (*Return on Equity*). Pada penelitian ini menggunakan ROA yang dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

7. Leverage

Leverage adalah rasio utang perusahaan, yang menunjukkan bagaimana aktivitas operasional perusahaan dibiayai oleh pinjaman. *Leverage* diukur dengan menggunakan *Debt to Ratio* (DR), yang dirumuskan sebagai berikut:

$$DR = \frac{\text{Total utang}}{\text{Total aset}}$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik Deskriptif

Gambaran mengenai statistik deskriptif digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev.
CETR	75	0,00015	4,882	0,329983	0,647535
INDP	75	0,2	0,6667	0,413582	0,12527
ACOM	75	1	6	3,05333	0,6554
INST	75	0	0,9974	0,572333	0,28098
SIZE	75	23,546	32,579	28,2492	1,69772
PROF	75	0,00423	0,63104	0,127956	0,1181
LEV	75	0,00032	0,93389	0,447019	0,20925

Sumber: Data Olahan, 2017

Hasil Pengujian Normalitas Data

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Data yang terdistribusi secara normal akan menghindari terjadinya bias dalam analisis data. Berikut adalah tabel hasil uji normalitas:

Sesuai dengan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) nilai probabilitas atau Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,246, dengan demikian nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 atau $0,246 > 0,05$, hal ini berarti data residual terdistribusi dengan normal.

Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk membuktikan atau menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Berikut adalah tabel uji multikolinearitas:

Tabel 3
Hasil Pengujian Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1	(Constant)		
	BOARD_INDP	,898	1,113
	ACOM	,938	1,066
	INST	,820	1,220
	SIZE	,740	1,351
	PROF	,931	1,075
	LEV	,918	1,090

Sumber: Data Olahan, 2017

Tabel uji multikolinearitas menunjukkan bahwa keenam variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 . Disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi berganda.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode ke $t-1$ (sebelumnya).

Tabel 4
Hasil Pengujian Autokorelasi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient s	t	Sig.	
	B	Std. Error				
1	Constant	-0,435	4,308		-0,101	0,92
	INDP	0,489	0,416	0,097	1,176	0,245
	ACOM	0,427	1,964	0,018	0,217	0,829
	INST	-0,278	0,158	-0,152	-1,759	0,084
	SIZE	0,336	2,928	0,01	0,115	0,909
	PROF	0,658	0,138	0,388	4,779	0
	LEV	0,737	0,085	0,708	8,65	0

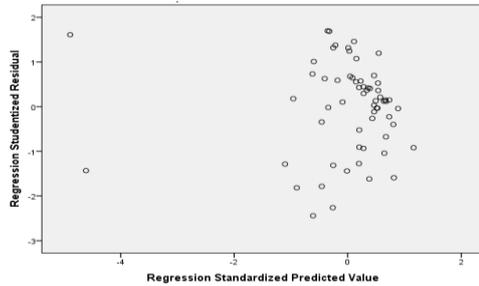
Sumber: Data Olahan, 2017

Hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai *Durbin-Watson* (d) adalah sebesar 1,222, yaitu berada antara -2 sampai +2, disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengandung autokorelasi.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data Olahan, 2017

Diagram *scatterplot* pada Gambar 2 menunjukkan adanya penyebaran titik secara acak baik di atas maupun di bawah angka 0, dan tidak terbentuk pola tertentu pada penyebaran titik pada diagram di atas. Hal ini mengindikasikan bahwa pada model regresi yang dikembangkan tidak terdapat heterokedastisitas.

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan analisa kuantitatif. Analisa kuantitatif adalah analisis yang dilakukan dengan bantuan alat uji statistik. Teknik analisa yang digunakan adalah analisa regresi linear berganda.

Tabel 5
Hasil Uji Regresi Berganda

Model	R	R Square	Durbin-Watson
1	,814 ^a	0,662	1,222

Sumber: Data Olahan, 2017

Berdasar tabel 6 maka diperoleh model persamaan regresi linear berganda berikut :

$$Y = -0,435 + 0,489 X_1 + 0,427 X_2 - 0,278 X_3 + 0,336 X_4 + 0,658 X_5 + 0,737 X_6 + e$$

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan ukuran yang digunakan

untuk menilai seberapa besar suatu model yang diterapkan dapat menjelaskan variabel dependennya. Tabel berikut menunjukkan koefisien determinasi dari variabel independen dalam penelitian ini:

Tabel 6
Hasil Uji R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,814	0,662	0,625	0,401721

Sumber: Data Olahan, 2017

Pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai *adjusted R*² = 0,625, yang berarti bahwa *corporate governance* yang diprosikan dengan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan, serta profitabilitas, dan *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak sebesar 62,5% sedangkan sisanya sebesar 37,5% dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Dari hasil uji t diketahui bahwa t_{hitung} lebih kecil daripada t_{tabel} , 1,176 < 2,004 dengan derajat signifikansi > 0,05. Disimpulkan bahwa komisaris independen *tidak berpengaruh* secara signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan jasa dan transportasi.

Hal ini disebabkan adanya kemungkinan komisaris independen tidak melakukan fungsi pengawasan secara optimal terhadap manajemen perusahaan, sehingga manajemen masih dapat melakukan aktivitas penghindaran pajak untuk menekan

beban pajak yang harus dibayarkan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Kurniasih (2012), Dewi dan Jati (2014), dan Meydisa (2016) bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara proporsi dewan komisaris independen terhadap aktivitas penghindaran pajak.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Tabel 6 menunjukkan bahwa $t_{hitung} = 0,217 < t_{tabel} = 2,004$ dengan derajat signifikansi sebesar 0,829 yang lebih besar dari tingkat kesalahan α (alpha) yaitu 0,05. Komite audit *tidak berpengaruh* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan jasa dan transportasi.

Peran komite audit dalam melakukan pengawasan bertujuan agar perusahaan menyampaikan informasi keuangan secara transparan dan dapat dipercaya. Peran tersebut tidak akan mempengaruhi tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk menekan beban pajak yang harus dibayarkan karena bagaimanapun manajemen memiliki wewenang penuh atas tindakannya. Penelitian ini sejalan dengan Sari (2014) dan Nisa (2010) yang juga menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh antara komite audit terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji t menunjukkan bahwa $t_{hitung} = -1,759 < t_{tabel} = 2,004$ dengan derajat signifikansi sebesar 0,084. Disimpulkan bahwa kepemilikan institusional *tidak berpengaruh* terhadap penghindaran pajak. Hal ini

bisa saja terjadi karena selain melakukan pengawasan terhadap manajemen, pemilik institusional memiliki hak untuk memastikan bahwa manajemen membuat keputusan yang akan mensejahterakan para pemegang saham. Sehingga konsentrasi kepemilikan saham oleh pihak instusi belum mampu memberikan kontrol yang maksimal terhadap tindakan manajemen untuk menekan beban pajak yang harus dibayarkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sari (2014), Annisa dan Kurniasih (2012), Maharani dan Suardana (2013), serta Utami (2013) yang juga menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$, $0,115 < 2,004$, dengan derajat signifikansi sebesar 0,909. Ukuran perusahaan *tidak berpengaruh* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan jasa dan transportasi. Ini terjadi karena penghindaran pajak dilakukan tidak hanya pada perusahaan dengan ukuran besar, tapi juga dilakukan oleh perusahaan menengah dan perusahaan kecil.

Nilai total aktiva perusahaan mungkin bukanlah satu-satunya tolak ukur yang dapat menentukan besar atau kecilnya perusahaan, faktor lainnya juga harus dipertimbangkan untuk menentukan ukuran perusahaan. Sejalan pula dengan penelitian ini, Utami (2013) Dewi dan Jati (2014), dan Puspita (2014) juga tidak menemukan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara

ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji t dan signifikansi pada Tabel 6 menunjukkan bahwa $t_{hitung} = 4,779 > t_{tabel} = 2,004$ dan derajat signifikansi sebesar 0,000. Membuktikan bahwa profitabilitas *berpengaruh* terhadap penghindaran pajak. Semakin besar laba maka semakin besar pula beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan, karena itu manajemen akan menekan beban pajak tersebut dengan melakukan aktivitas penghindaran pajak. Maka semakin tinggi profitabilitas maka semakin besar pula aktivitas penghindaran pajak perusahaan. Sejalan dengan penelitian ini, Oktagiani (2015), dan Maharani dan Suardana (2014) juga menemukan bahwa profitabilitas perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan.

Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

Tabel 6 menunjukkan $t_{hitung} = 8,650 > t_{tabel} = 2,004$ dengan derajat signifikansi sebesar 0,000. Ini berarti *leverage berpengaruh* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan jasa dan transportasi. Kenaikan pada rasio hutang (*leverage*) juga turut dibarengi dengan peningkatan penghindaran pajak. Karena semakin besar hutang perusahaan maka semakin besar pula beban bunga, dan beban bunga atas pinjaman dapat dijadikan sebagai pengurang pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, Oktagiani (2015), Marfu'ah (2015), dan Meydisa (2016) juga menemukan

bahwa *leverage* atau rasio hutang perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis dari analisis data, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Corporate Governance (CG)* yang diproksikan dengan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.
3. *Leverage* berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Saran

Berikut adalah beberapa saran yang sekiranya dapat membantu peneliti selanjutnya sehingga mampu memberikan hasil yang lebih akurat:

1. Peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian selain dari perusahaan jasa dan transportasi yang terdaftar di BEI.
2. Peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah perusahaan sampel dengan memperluas cakupan populasi penelitian.
3. Peneliti selanjutnya dapat memperpanjang masa penelitian menjadi lima tahun atau lebih.
4. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lain seperti kualitas audit, hubungan politik, kompensasi manajemen, kompensasi rugi fiksial, risiko politik, dan faktor-faktor lain yang

dapat mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Nuralifmida Ayu dan Kurniasih, Lulus. 2012. *Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2008)*. Jurnal Akuntansi & Auditing Volume 8/No. 2/Mei 2012.
- Dewi, Ni Nyoman Kristiana dan Jati, I Ketut. 2014. *Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 6.2 (2014) hal: 249-260.
- Jensen, Michael C. And Meckling, William H. 1976. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics, October, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360.
- Kurniasih, Tommy dan Sari, Maria M. Ratna. 2013. *Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance*. Buletin Studi Ekonomi, Volume 18, No. 1, Februari 2013 Universitas Udayana: Bali.
- Lindberg, Deborah L. 2004. *Corporate Governance – The Role of the Audit Committee*. Department of Accounting Illinois State University.
- Maharani, I Gusti Ayu Cahya dan Suardana, Ketut Alit. 2014. *Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 9.2 (2014) hal: 525-539.
- Marfu'ah, Laila. 2015. *Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Kompensasi Rugi Fiskal Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance*. Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Meydisa, Indah. 2016. *Pengaruh Komisaris Independen, Kualitas Audit, Kepemilikan Intitusional, Leverage, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. Jom FEKON Universitas Riau Vol. 3 No. 1 Februari 2015.
- Ngadiman dan Puspitasari, Christiany. 2014. *Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012*. Jurnal Akuntansi/Volume XVIII,

- No. 03, September 2014: 408-421. Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.
- Oktagiani, Rizka. 2015. *Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. Jom FEKON Universitas Riau Vol. 2 No. 2 Oktober 2015.
- Pohan, H.T. 2008. *Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, AkruaI Pilihan, Tarif Efektif Pajak, Dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik*. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik, Vol. 4 No.2: 112-135
- Puspita, Silvia Ratih dan Harto, Puji. 2014. *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak*. Diponegoro Journal Of Accounting Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014, Halaman 1-13.
- Sari, Gusti Maya. 2014. *Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2008 -2012)*. Universitas Negeri Padang.
- Shleifer, A. and Vishny, R.W. (1997). *A Survey of Corporate Governance*. NBER Working Paper Series.
- Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak*. Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
- Surbakti, Theresa Adelina Victoria. 2012. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010*. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Swingly, Calvin. *Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth Pada Tax Avoidance*. 2015. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 10.1 hal: 47-62. Universitas Udayana.
- Utami, Nurindah Wahyu. 2013. *Pengaruh Struktur Corporate Governance, Size, Profitabilitas Perusahaan terhadap Tax Avoidance*. Skripsi Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.

<http://www.idx.co.id>